No. Katalog : 3205008.73

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2020

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

https://sulsel.bps.go.id

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2020

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020

ISBN: 978-623-6203-03-3

Nomor Publikasi: 73000.2119

Katalog BPS: 3205008.73

Ukuran Buku: 16,5 cm x 22 cm

Jumlah Halaman: x +29 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Sampul oleh:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://sulsel.bps.go.id

TIM PENYUSUN

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020

Pengarah :
Yos Rusdiansyah

Penanggung Jawab :
Faharuddin

Editor :
Is Anjar Wulandari

Penyusun / Penulis :
Ayub Parlin Ampulembang

https://sulsel.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Setiap tahun, BPS berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah satunya melalui publikasi "Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2020".

Publikasi "Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2020" berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2020.

Diharapkan publikasi "Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2020" dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Makassar, April 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan

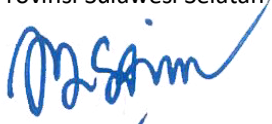

Yos Rusdiansyah, SE, MM

https://sulsel.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		v
Daftar Isi		vi
Daftar Tabel		vii
Daftar Gambar		ix
I	Pendahuluan	1
II	Metode Penghitungan Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota	2
III	Konsep dan Definisi	4
IV	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	7
V	Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan	13
Daftar Pustaka		29

https://sulsel.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2016 - Maret 2020	7
4.2	Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komoditi di Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020	9
4.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah di Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020	11
4.4	Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2016 - Maret 2020	12
5.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019	13
5.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020	14
5.3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019	15
5.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020	16
5.5	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2019	17
5.6	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2020	18
5.7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2019.	19

https://sulsel.bps.go.id

5.8 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2020. 20

5.9 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2019. 21

5.10 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2020. 22

5.11 Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2019..... 23

5.12 Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2020..... 24

5.13 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Miskin, Tahun 2019..... 25

5.14 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Miskin, Tahun 2020..... 26

5.15 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin, dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019..... 27

5.16 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) atau BPNT serta Rata-rata Jumlah Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT yang Diterima Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020..... 28

https://sulsel.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 4.1.	Jumlah (dalam 000) dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020	7
Gambar 4.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020	8
Gambar 4.3	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020.....	10

https://sulsel.bps.go.id

https://sulsel.bps.go.id

I. PENDAHULUAN

- Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

- Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.

https://sulsel.bps.go.id

II. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

KONSEP

- BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

SUMBER DATA

- Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2020 adalah Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2020.
- Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan kabupaten/kota tahun 2020 ini menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk 2010.

TEKNIK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN

- Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
- Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

https://sulsel.bps.go.id

- GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran.
- GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- Selanjutnya dihitung jumlah penduduk di bawah GK untuk tingkat kabupaten/kota.

INDIKATOR KEMISKINAN

- *Head Count Index* (HCI-P_0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah GK.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*-P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- Ukuran tingkat kemiskinan menggunakan rumusan yang disampaikan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984).

https://sulsel.bps.go.id

III. KONSEP DAN DEFINISI

PENDIDIKAN

- **Pendidikan yang ditamatkan** adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

- **Angka melek huruf** adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 dan 15-55 tahun.

- **Angka partisipasi sekolah** adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berusia sekolah.

https://sulsel.bps.go.id

KETENAGAKERJAAN

- **Bekerja** adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.

- **Bekerja di sektor informal** adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

- **Bekerja di sektor formal** adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

- **Bekerja di sektor pertanian** adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi, dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya.

- **Bekerja di sektor bukan pertanian** adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

- **Tidak bekerja** adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK MAKANAN

- **Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan** adalah total pengeluaran perkapita/bulan untuk makanan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

FASILITAS PERUMAHAN

- **Rumah tangga pengguna air layak** adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari:
  a. Air terlindung yaitu leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah $\geq$ 10 meter.
  b. Air telindung tapi jarak ke penampungan kotoran/limbah < 10 meter/air tidak *sustain* (air hujan)/ air tidak terlindung namun sumber mandi/cuci/dll berasal dari air terlindung.

https://sulsel.bps.go.id

- **Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama** adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

PROGRAM PEMERINTAH PENANGGULANAGAN KEMISKINAN

- **Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berependapatan Rendah (Program Raskin/Rastra)** adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra). Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

https://sulsel.bps.go.id

IV. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

4.1. Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020

Gambar 4.1. Jumlah (dalam 000) dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020

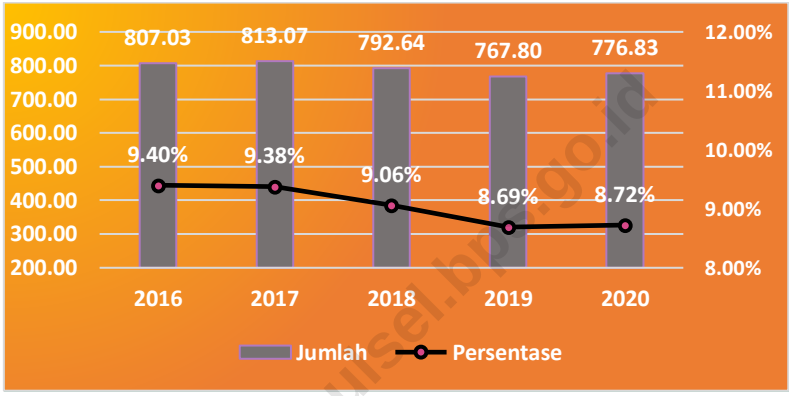

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan keadaan Maret 2020 berjumlah 767,80 ribu jiwa atau 8,72 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Apabila dilihat berdasarkan Gambar 4.1 penduduk miskin mengalami peningkatan secara persentase yaitu sebesar 0,03 poin persen, juga mengalami peningkatan secara absolut sebesar 9,03 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2019 yang besarnya 8,69 persen atau 767,80 ribu jiwa.

Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2016 - Maret 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Maret 2016	149,13	657,90	807,03	4,51	12,46	9,40
Maret 2017	153,56	659,51	813,07	4,48	12,59	9,38
Maret 2018	167,94	624,70	792,64	4,61	12,24	9,06
Maret 2019	170,10	597,69	767,80	4,44	11,95	8,69
Maret 2020	173,80	603,03	776,83	4,49	11,97	8,72

PPIS Sulsel.bps.go.id

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar berada di daerah perdesaan. Pada Maret 2020, penduduk miskin di perdesaan mencapai 603,03 ribu jiwa (77,63 persen), sementara di daerah perkotaan hanya 173,80 ribu jiwa (22,37 persen). Dibandingkan dengan Maret 2019, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan 3,70 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 5,34 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2020 penduduk miskin di perdesaan mencapai 11,97 persen sedangkan di perkotaan sebesar 4,49 persen.

4.2. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2016 - Maret 2020

Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020

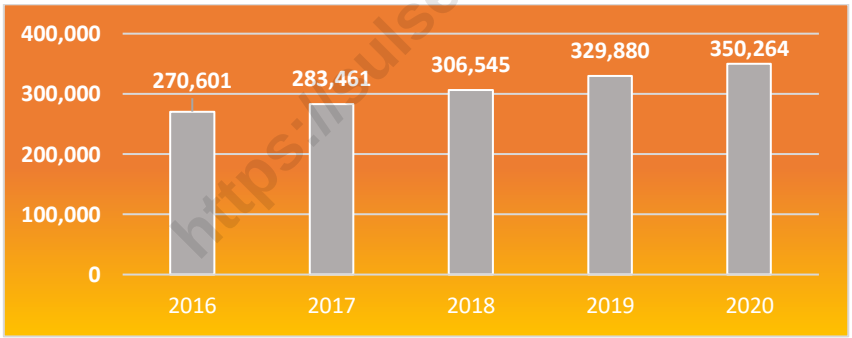

https://sulsel.bps.go.id

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Dari hasil pendataan Susenas Maret 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka didapatkan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 350.264,-. Apabila dilihat dari perkembangannya, Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2020 adalah sebesar 6,18 persen.

Tabel 4.2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komoditi di Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2016	193 372	88 304	281 676
Maret 2017	204 192	92 452	296 644
Maret 2018	218 173	96 376	314 549
Maret 2019	238 425	100 572	338 997
Maret 2020	257 455	105 906	363 361
Perdesaan			
Maret 2016	209 095	54 579	263 674
Maret 2017	215 791	58 643	274 434
Maret 2018	236 336	63 581	299 917
Maret 2019	254 134	68 088	322 223
Maret 2020	268 024	71 719	339 743
Kota+Desa			
Maret 2016	203 918	66 683	270 601
Maret 2017	211 452	72 009	283 461
Maret 2018	229 289	77 256	306 545
Maret 2019	247 704	82 176	329 880
Maret 2020	263 690	86 574	350 264

https://sulsel.bps.go.id

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Pada Maret 2019, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,09 persen, hal yang sama terjadi pada Maret 2020 peranannya juga relatif sama namun mengalami peningkatan menjadi 75,28 persen. Peranan GKM terhadap GK untuk daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 70,33 persen dan pada Maret 2020 mengalami peningkatan menjadi 70,85 persen. Sedangkan untuk daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 78,89 persen cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin persen dari Maret 2019 yang sebesar 78,87 persen.

Pada Maret 2019 untuk daerah perkotaan, sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 29,67 persen dan mengalami penurunan pada Maret 2020 yang sebesar 29,15 poin persen. Hal yang sama juga terjadi pada daerah perdesaan, pada Maret 2019 peranannya sebesar 21,13 persen menjadi 21,11 persen pada Maret 2020.

4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Gambar 4.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020

https://sulsel.bps.go.id

Seperti halnya jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, nilai P_1 dan P_2 juga mengalami hal yang sama. Gambar 4.3 menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2019 terhadap tahun 2020. Nilai P_1 mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin dan nilai P_2 meningkat sebesar 0,05 poin.

Tabel 4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah di Sulawesi Selatan, Maret 2016 - Maret 2020

Daerah/Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2016	0,65	2,56	1,83
Maret 2017	0,81	2,32	1,72
Maret 2018	0,83	2,07	1,55
Maret 2019	0,63	2,07	1,45
Maret 2020	0,69	2,17	1,53
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2016	0,12	0,79	0,55
Maret 2017	0,20	0,63	0,46
Maret 2018	0,22	0,50	0,38
Maret 2019	0,13	0,51	0,34
Maret 2020	0,16	0,57	0,39

https://sulsel.bps.go.id

Pada periode Maret 2019 - Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami peningkatan 0,08 poin yaitu dari 1,45 pada keadaan Maret 2019 menjadi 1,53 pada keadaan Maret 2020. Demikian juga untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin yaitu dari 0,34 pada keadaan Maret 2019 menjadi 0,39 pada keadaan Maret 2020 (Tabel 4.3). Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan 0,69 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,17. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan 0,16 sementara daerah perdesaan

mencapai 0,57. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik daripada perdesaan.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat juga bahwa nilai P_1 untuk daerah perkotaan naik 0,06 poin selama periode Maret 2019 hingga Maret 2020. Demikian halnya dengan P_2 yang mengalami peningkatan dari 0,13 menjadi 0,16 pada periode yang sama. Sedangkan di daerah perdesaan, P_1 dan P_2 juga mengalami peningkatan, masing-masing meningkat sekitar 0,10 poin dan 0,06 poin.

4.4. Perkembangan Gini Ratio Maret 2016 - Maret 2020

Tabel 4.4. Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2016 - Maret 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota+Desa
Maret 2016	0,422	0,367	0,426
Maret 2017	0,410	0,348	0,407
Maret 2018	0,392	0,361	0,397
Maret 2019	0,394	0,345	0,389
Maret 2020	0,384	0,356	0,389

https://sulsel.bps.go.id

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Selama periode Maret 2016 – Maret 2019, tampak bahwa Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan terus menurun. Gini Ratio pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,426, terus menurun hingga Maret 2019 menjadi 0,389. Sementara untuk kondisi Maret 2020, Gini Ratio cenderung sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,389.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2019 hingga Maret 2020 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,010 poin. Sedangkan di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin pada Maret 2020 dibanding dengan Maret 2019.

V. Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

KEMISKINAN

Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P_1, P_2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P_1	P_2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	17,36	12,83	2,87	0,90	370 380
2	Bulukumba	30,49	7,26	0,60	0,09	330 161
3	Bantaeng	16,91	9,03	1,35	0,28	309 357
4	Jeneponto	54,05	14,88	2,02	0,41	359 883
5	Takalar	25,93	8,70	1,08	0,19	356 973
6	Gowa	57,99	7,53	0,92	0,17	385 820
7	Sinjai	22,27	9,14	1,08	0,22	294 916
8	Maros	34,85	9,89	2,50	0,89	405 944
9	Pangkajene dan Kepulauan	47,07	14,06	1,81	0,31	322 958
10	Barru	14,92	8,57	1,07	0,21	322 248
11	Bone	76,25	10,06	1,35	0,29	325 422
12	Soppeng	16,45	7,25	0,69	0,12	297 546
13	Wajo	27,48	6,91	1,06	0,26	311 017
14	Sidenreng Rappang	14,44	4,79	0,60	0,13	312 800
15	Pinrang	31,85	8,46	1,54	0,40	294 349
16	Enrekang	25,40	12,33	1,70	0,38	331 667
17	Luwu	46,18	12,78	2,71	0,72	318 911
18	Tana Toraja	28,87	12,35	3,10	1,12	316 911
19	Luwu Utara	42,48	13,60	2,55	0,61	342 277
20	Luwu TImur	20,83	6,98	1,11	0,25	333 739
21	Toraja Utara	28,64	12,41	1,99	0,46	314 426
22	Kota Makassar	65,12	4,28	0,60	0,15	418 831
23	Kota Parepare	7,62	5,26	0,71	0,15	323 839
24	Kota Palopo	14,37	7,82	1,15	0,29	324 233
Sulawesi Selatan		**767,80**	**8,69**	**1,45**	**0,34**	**329 880**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P_1, P_2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P_1	P_2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	17,04	12,48	2,25	0,60	396 822
2	Bulukumba	30,00	7,10	0,71	0,14	351 180
3	Bantaeng	16,84	8,95	0,97	0,18	340 890
4	Jeneponto	53,24	14,58	2,60	0,68	366 453
5	Takalar	25,38	8,44	1,09	0,21	364 378
6	Gowa	57,68	7,38	1,18	0,30	390 917
7	Sinjai	22,06	9,00	1,34	0,36	329 819
8	Maros	34,62	9,74	1,45	0,34	414 324
9	Pangkajene dan Kepulauan	47,12	13,96	2,52	0,71	358 061
10	Barru	14,44	8,26	1,31	0,36	337 047
11	Bone	81,33	10,68	1,59	0,36	345 009
12	Soppeng	17,23	7,59	0,83	0,16	315 455
13	Wajo	27,69	6,95	0,98	0,21	350 765
14	Sidenreng Rappang	15,36	5,05	0,82	0,19	349 452
15	Pinrang	33,56	8,86	1,27	0,34	336 346
16	Enrekang	25,25	12,17	1,61	0,34	338 731
17	Luwu	46,04	12,65	2,12	0,49	347 539
18	Tana Toraja	28,41	12,10	2,32	0,74	336 877
19	Luwu Utara	42,20	13,41	2,29	0,61	354 669
20	Luwu TImur	20,82	6,85	1,05	0,24	350 576
21	Toraja Utara	27,88	12,01	1,75	0,37	328 096
22	Kota Makassar	69,98	4,54	0,58	0,12	442 513
23	Kota Parepare	7,96	5,44	0,94	0,24	363 710
24	Kota Palopo	14,71	7,85	0,95	0,21	362 859
Sulawesi Selatan		**776,83**	**8,72**	**1,53**	**0,39**	**350 264**

https://sulsel.bps.go.id

PENDIDIKAN

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	34,25	45,52	20,23
2	Bulukumba	29,36	51,16	19,48
3	Bantaeng	54,07	43,64	2,29
4	Jeneponto	44,81	37,55	17,63
5	Takalar	36,85	50,45	12,70
6	Gowa	34,19	54,64	11,17
7	Sinjai	35,22	48,10	16,68
8	Maros	39,82	43,94	16,24
9	Pangkajene dan Kepulauan	29,80	43,32	26,88
10	Barru	34,26	54,03	11,70
11	Bone	37,85	56,23	5,92
12	Soppeng	45,62	45,43	8,95
13	Wajo	42,44	46,21	11,35
14	Sidenreng Rappang	43,32	42,56	14,11
15	Pinrang	34,40	51,53	14,07
16	Enrekang	25,09	48,86	26,05
17	Luwu	25,27	45,39	29,35
18	Tana Toraja	34,20	38,56	27,24
19	Luwu Utara	19,41	61,96	18,64
20	Luwu TImur	28,92	62,67	8,41
21	Toraja Utara	37,97	43,87	18,16
22	Kota Makassar	24,85	50,20	24,94
23	Kota Parepare	21,58	40,42	38,01
24	Kota Palopo	7,38	60,07	32,55
Sulawesi Selatan		**33,48**	**49,06**	**17,46**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	32,17	52,06	15,77
2	Bulukumba	39,79	52,32	7,89
3	Bantaeng	49,46	42,14	8,40
4	Jeneponto	36,94	41,35	21,71
5	Takalar	42,77	37,59	19,64
6	Gowa	40,54	43,80	15,67
7	Sinjai	38,00	41,29	20,71
8	Maros	37,79	47,14	15,07
9	Pangkajene dan Kepulauan	28,93	52,24	18,83
10	Barru	28,05	56,63	15,32
11	Bone	38,23	48,60	13,17
12	Soppeng	34,06	45,42	20,52
13	Wajo	43,67	50,12	6,21
14	Sidenreng Rappang	22,00	64,45	13,56
15	Pinrang	33,42	48,28	18,30
16	Enrekang	29,07	48,77	22,16
17	Luwu	23,01	59,53	17,45
18	Tana Toraja	34,63	44,39	20,98
19	Luwu Utara	24,89	47,51	27,60
20	Luwu TImur	19,89	60,45	19,66
21	Toraja Utara	38,99	44,10	16,91
22	Kota Makassar	18,99	53,59	27,42
23	Kota Parepare	22,02	50,71	27,27
24	Kota Palopo	15,25	46,79	37,96
Sulawesi Selatan		**32,86**	**48,76**	**18,38**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.5. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk MIskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Selayar	100,00	98,28	100,00	99,60
2	Bulukumba	100,00	98,77	100,00	90,97
3	Bantaeng	100,00	95,58	85,63	89,74
4	Jeneponto	100,00	86,27	97,46	72,82
5	Takalar	100,00	92,90	100,00	71,38
6	Gowa	100,00	88,95	100,00	78,72
7	Sinjai	95,94	94,58	100,00	59,75
8	Maros	100,00	86,53	100,00	100,00
9	Pangkajene dan Kepulauan	100,00	95,21	100,00	97,38
10	Barru	100,00	88,13	100,00	67,73
11	Bone	95,63	90,49	90,46	95,03
12	Soppeng	100,00	95,11	100,00	100,00
13	Wajo	100,00	89,99	93,93	84,21
14	Sidenreng Rappang	100,00	87,31	100,00	86,63
15	Pinrang	95,81	92,11	100,00	99,28
16	Enrekang	95,83	95,01	97,81	100,00
17	Luwu	100,00	94,87	97,18	95,38
18	Tana Toraja	100,00	94,17	100,00	90,51
19	Luwu Utara	100,00	97,07	100,00	83,00
20	Luwu Tlmur	100,00	100,00	98,02	88,48
21	Toraja Utara	100,00	90,17	95,72	95,99
22	Kota Makassar	100,00	100,00	100,00	65,83
23	Kota Parepare	100,00	96,03	100,00	87,73
24	Kota Palopo	100,00	98,94	100,00	99,85
Sulawesi Selatan		**99,29**	**93,21**	**97,77**	**86,40**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.6. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk MIskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Selayar	100,00	95,02	100,00	100,00
2	Bulukumba	87,02	81,50	97,34	85,49
3	Bantaeng	100,00	87,11	100,00	100,00
4	Jeneponto	98,52	88,37	99,66	92,70
5	Takalar	100,00	91,59	100,00	90,07
6	Gowa	96,42	89,54	99,61	77,29
7	Sinjai	100,00	88,00	100,00	74,50
8	Maros	100,00	93,42	100,00	87,82
9	Pangkajene dan Kepulauan	100,00	92,89	100,00	88,81
10	Barru	100,00	88,79	100,00	94,14
11	Bone	100,00	89,97	95,91	100,00
12	Soppeng	100,00	91,65	100,00	100,00
13	Wajo	100,00	88,58	95,58	59,88
14	Sidenreng Rappang	100,00	97,57	100,00	100,00
15	Pinrang	100,00	95,51	100,00	86,45
16	Enrekang	100,00	94,55	100,00	81,54
17	Luwu	100,00	94,35	96,75	91,26
18	Tana Toraja	100,00	93,64	100,00	93,08
19	Luwu Utara	100,00	98,18	96,83	90,73
20	Luwu TImur	100,00	96,68	100,00	100,00
21	Toraja Utara	98,72	91,74	95,94	91,32
22	Kota Makassar	100,00	96,98	96,03	65,78
23	Kota Parepare	100,00	98,49	100,00	88,38
24	Kota Palopo	100,00	98,38	94,81	88,87
Sulawesi Selatan		**99,27**	**92,47**	**98,25**	**86,32**

https://sulsel.bps.go.id

KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	41,20	41,11	17,69
2	Bulukumba	64,62	30,51	4,87
3	Bantaeng	27,36	59,44	13,20
4	Jeneponto	41,22	51,22	7,56
5	Takalar	42,36	40,92	16,72
6	Gowa	49,34	34,56	16,10
7	Sinjai	42,28	53,52	4,19
8	Maros	40,96	43,93	15,11
9	Pangkajene dan Kepulauan	55,12	26,49	18,39
10	Barru	61,21	28,50	10,30
11	Bone	42,96	47,51	9,52
12	Soppeng	49,87	43,34	6,79
13	Wajo	50,74	39,31	9,95
14	Sidenreng Rappang	59,96	23,40	16,63
15	Pinrang	46,99	33,42	19,60
16	Enrekang	34,89	57,97	7,15
17	Luwu	44,17	45,90	9,93
18	Tana Toraja	29,62	68,23	2,15
19	Luwu Utara	53,22	38,07	8,70
20	Luwu TImur	41,24	37,41	21,35
21	Toraja Utara	18,59	76,15	5,26
22	Kota Makassar	53,98	19,34	26,68
23	Kota Parepare	57,74	27,33	14,92
24	Kota Palopo	51,57	15,06	33,37
Sulawesi Selatan		**46,30**	**40,58**	**13,12**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	46,96	43,09	9,95
2	Bulukumba	55,43	29,30	15,27
3	Bantaeng	43,43	38,10	18,48
4	Jeneponto	48,22	39,30	12,48
5	Takalar	51,99	34,43	13,58
6	Gowa	56,12	27,17	16,70
7	Sinjai	37,92	59,26	2,82
8	Maros	47,58	35,16	17,26
9	Pangkajene dan Kepulauan	55,53	23,47	21,00
10	Barru	57,21	34,72	8,07
11	Bone	50,85	43,11	6,04
12	Soppeng	38,72	32,76	28,52
13	Wajo	48,09	28,61	23,31
14	Sidenreng Rappang	55,57	31,34	13,09
15	Pinrang	50,36	31,82	17,82
16	Enrekang	42,31	50,53	7,16
17	Luwu	42,33	43,55	14,12
18	Tana Toraja	44,44	48,70	6,85
19	Luwu Utara	43,16	50,97	5,87
20	Luwu Tlmur	46,99	38,06	14,94
21	Toraja Utara	27,54	62,19	10,26
22	Kota Makassar	49,65	9,16	41,19
23	Kota Parepare	40,64	25,41	33,95
24	Kota Palopo	51,33	21,65	27,02
Sulawesi Selatan		**48,19**	**35,82**	**15,99**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	41,20	35,71	23,09
2	Bulukumba	64,62	22,35	13,03
3	Bantaeng	27,36	40,74	31,91
4	Jeneponto	41,22	42,19	16,59
5	Takalar	42,36	36,93	20,71
6	Gowa	49,34	25,42	25,24
7	Sinjai	42,28	45,88	11,83
8	Maros	40,96	36,30	22,74
9	Pangkajene dan Kepulauan	55,12	18,13	26,75
10	Barru	61,21	25,53	13,26
11	Bone	42,96	39,74	17,30
12	Soppeng	49,87	34,12	16,01
13	Wajo	50,74	23,20	26,06
14	Sidenreng Rappang	59,96	17,90	22,14
15	Pinrang	46,99	27,95	25,07
16	Enrekang	34,89	54,66	10,45
17	Luwu	44,17	40,69	15,15
18	Tana Toraja	29,62	64,74	5,64
19	Luwu Utara	53,22	33,91	12,87
20	Luwu TImur	41,24	36,48	22,28
21	Toraja Utara	18,59	66,14	15,27
22	Kota Makassar	53,98	0,00	46,02
23	Kota Parepare	57,74	0,00	42,26
24	Kota Palopo	51,57	9,26	39,17
Sulawesi Selatan		**46,30**	**31,89**	**21,81**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.10. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	46,96	36,64	16,40
2	Bulukumba	55,43	36,00	8,56
3	Bantaeng	43,43	35,04	21,54
4	Jeneponto	48,22	34,31	17,47
5	Takalar	51,99	15,42	32,60
6	Gowa	56,12	20,20	23,68
7	Sinjai	37,92	53,76	8,33
8	Maros	47,58	31,58	20,85
9	Pangkajene dan Kepulauan	55,53	17,55	26,92
10	Barru	57,21	31,57	11,21
11	Bone	50,85	36,66	12,49
12	Soppeng	38,72	31,52	29,76
13	Wajo	48,09	21,70	30,21
14	Sidenreng Rappang	55,57	16,49	27,94
15	Pinrang	50,36	35,67	13,97
16	Enrekang	42,31	51,73	5,96
17	Luwu	42,33	43,73	13,94
18	Tana Toraja	44,44	45,18	10,38
19	Luwu Utara	43,16	38,10	18,74
20	Luwu TImur	46,99	35,08	17,93
21	Toraja Utara	27,54	64,98	7,47
22	Kota Makassar	49,65	-	50,35
23	Kota Parepare	40,64	2,50	56,86
24	Kota Palopo	51,33	9,02	39,65
Sulawesi Selatan		**48,19**	**30,46**	**21,35**

https://sulsel.bps.go.id

PENGELUARAN PERKAPITA

Tabel 5.11. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	59,60	56,81	57,17
2	Bulukumba	57,81	54,97	55,17
3	Bantaeng	66,43	55,52	56,51
4	Jeneponto	62,31	56,41	57,29
5	Takalar	62,28	52,97	53,78
6	Gowa	61,38	53,18	53,80
7	Sinjai	58,04	52,53	53,03
8	Maros	58,61	51,45	52,16
9	Pangkajene dan Kepulauan	63,90	55,31	56,51
10	Barru	55,39	51,31	51,66
11	Bone	58,50	52,48	53,08
12	Soppeng	60,41	53,54	54,03
13	Wajo	61,63	54,68	55,16
14	Sidenreng Rappang	63,25	55,46	55,83
15	Pinrang	61,51	57,87	58,18
16	Enrekang	59,79	57,91	58,14
17	Luwu	60,28	54,52	55,25
18	Tana Toraja	61,55	57,26	57,79
19	Luwu Utara	58,68	55,10	55,59
20	Luwu TImur	55,54	51,43	51,71
21	Toraja Utara	60,84	57,43	57,86
22	Kota Makassar	57,64	49,10	49,47
23	Kota Parepare	58,17	51,70	52,04
24	Kota Palopo	60,42	49,92	50,74
Sulawesi Selatan		**60,16**	**53,28**	**53,88**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.12. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	70,66	58,07	59,64
2	Bulukumba	72,33	60,76	61,59
3	Bantaeng	75,90	59,81	61,25
4	Jeneponto	70,56	60,60	62,05
5	Takalar	68,86	54,84	56,02
6	Gowa	72,84	56,81	57,99
7	Sinjai	70,81	56,85	58,11
8	Maros	74,71	54,47	56,45
9	Pangkajene dan Kepulauan	71,33	58,22	60,05
10	Barru	72,73	57,70	58,95
11	Bone	67,60	53,82	55,29
12	Soppeng	64,67	55,87	56,54
13	Wajo	70,70	56,06	57,07
14	Sidenreng Rappang	69,89	54,81	55,57
15	Pinrang	68,68	57,18	58,20
16	Enrekang	71,68	60,81	62,13
17	Luwu	70,89	56,66	58,46
18	Tana Toraja	77,04	61,42	63,31
19	Luwu Utara	73,44	59,76	61,59
20	Luwu TImur	70,15	49,60	51,01
21	Toraja Utara	76,06	60,79	62,62
22	Kota Makassar	60,83	49,04	49,58
23	Kota Parepare	60,58	49,52	50,12
24	Kota Palopo	65,98	50,79	51,98
Sulawesi Selatan		**70,18**	**55,27**	**56,57**

https://sulsel.bps.go.id

FASILITAS PERUMAHAN

Tabel 5.13. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	85,45	45,23
2	Bulukumba	74,52	90,36
3	Bantaeng	91,31	47,27
4	Jeneponto	84,94	68,68
5	Takalar	65,53	76,21
6	Gowa	72,09	89,92
7	Sinjai	85,12	86,78
8	Maros	62,58	53,73
9	Pangkajene dan Kepulauan	86,58	80,68
10	Barru	78,39	88,24
11	Bone	67,76	75,83
12	Soppeng	83,89	96,68
13	Wajo	69,42	89,67
14	Sidenreng Rappang	72,46	91,66
15	Pinrang	53,45	76,90
16	Enrekang	58,92	84,41
17	Luwu	57,16	64,37
18	Tana Toraja	28,54	75,41
19	Luwu Utara	49,47	71,28
20	Luwu TImur	30,47	78,95
21	Toraja Utara	55,67	89,85
22	Kota Makassar	99,04	100,00
23	Kota Parepare	69,82	91,10
24	Kota Palopo	84,52	71,15
Sulawesi Selatan		**69,49**	**78,60**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.14. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	81,09	53,27
2	Bulukumba	78,50	87,57
3	Bantaeng	86,17	50,68
4	Jeneponto	76,86	76,67
5	Takalar	85,67	92,03
6	Gowa	58,22	87,77
7	Sinjai	75,03	95,97
8	Maros	70,91	72,11
9	Pangkajene dan Kepulauan	81,59	82,87
10	Barru	91,47	91,98
11	Bone	70,23	90,59
12	Soppeng	43,73	97,79
13	Wajo	49,07	86,02
14	Sidenreng Rappang	55,75	96,18
15	Pinrang	68,33	84,03
16	Enrekang	55,36	91,71
17	Luwu	48,97	74,69
18	Tana Toraja	14,00	83,05
19	Luwu Utara	57,69	82,85
20	Luwu TImur	36,17	70,96
21	Toraja Utara	50,94	96,26
22	Kota Makassar	95,42	94,38
23	Kota Parepare	84,38	97,27
24	Kota Palopo	77,45	94,10
Sulawesi Selatan		**66,91**	**84,60**

https://sulsel.bps.go.id

PROGRAM PEMERINTAH

Tabel 5.15. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin, dan Rata-Rata Harga Pembelian Raskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Ruta Miskin Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	61,94	11,88	n.a
2	Bulukumba	37,87	10,96	n.a
3	Bantaeng	40,15	10,83	n.a
4	Jeneponto	93,52	7,27	n.a
5	Takalar	21,66	n.a	10,26
6	Gowa	25,70	11,78	8,83
7	Sinjai	39,86	n.a	6,24
8	Maros	41,58	12,67	7,28
9	Pangkajene dan Kepulauan	55,31	10,56	n.a
10	Barru	49,75	12,23	n.a
11	Bone	49,54	n.a	6,05
12	Soppeng	52,45	11,57	n.a
13	Wajo	49,17	10,00	8,80
14	Sidenreng Rappang	24,32	10,58	10,00
15	Pinrang	32,53	12,92	n.a
16	Enrekang	65,15	10,20	n.a
17	Luwu	52,56	10,09	n.a
18	Tana Toraja	50,68	10,96	n.a
19	Luwu Utara	58,70	15,16	n.a
20	Luwu TImur	27,01	n.a	7,83
21	Toraja Utara	59,43	12,59	n.a
22	Kota Makassar	24,82	n.a	9,18
23	Kota Parepare	37,06	15,00	10,07
24	Kota Palopo	30,31	n.a	10,00
Sulawesi Selatan		**46,16**	**10,80**	**7,84**

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 5.16. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) atau BPNT serta Rata-rata Jumlah Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT yang Diterima Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Ruta Miskin Penerima Manfaat Program (%)	Rata-rata Beras (Kg)	Rata-rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	28,68	12,82	10 892
2	Bulukumba	17,30	10,06	8 588
3	Bantaeng	28,55	10,02	10 189
4	Jeneponto	29,05	9,86	9 391
5	Takalar	32,50	9,64	9 584
6	Gowa	29,95	11,96	9 656
7	Sinjai	35,73	10,17	10 046
8	Maros	46,55	8,63	9 568
9	Pangkajene dan Kepulauan	38,84	11,88	9 790
10	Barru	49,70	9,59	10 306
11	Bone	35,62	8,25	9 460
12	Soppeng	23,37	10,00	9 543
13	Wajo	32,48	9,84	10 607
14	Sidenreng Rappang	6,01	10,00	11 000
15	Pinrang	43,13	12,47	10 519
16	Enrekang	35,78	9,56	10 053
17	Luwu	37,01	32,74	9 351
18	Tana Toraja	32,02	11,92	10 054
19	Luwu Utara	30,54	24,99	9 594
20	Luwu TImur	30,45	10,95	10 114
21	Toraja Utara	46,53	9,80	10 670
22	Kota Makassar	30,89	9,72	9 881
23	Kota Parepare	40,70	11,52	10 263
24	Kota Palopo	34,95	12,40	10 393
Sulawesi Selatan		**33,16**	**12,39**	**9 846**

https://sulsel.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2020. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2020.* BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2020. *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2019.* BPS Prov. Sulawesi Selatan: Makassar.

https://sulsel.bps.go.id

Sensus Penduduk 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://sulsel.bps.go.id

ISBN 978-623-6203-03-3

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Haji Bau No.6 Makassar 90125
Telp.(0411)854838, Fax: (0411)851225
Homepage: *http://sulsel.bps.go.id* email: *bps7300@bps.go.id*